

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA DI WANA WISATA KAWAH PUTIH

¹Sugeng Hermanto, dan ²Nurdin Hidayah

^{1,2}Dosen Jurusan Kepariwisataan Sekolah Tinggi pariwisata Bandung

Email: nurdin@stp-bandung.ac.id

Abstract

This study aims to determine the community's involvement in the development of tourism business at Wana Wisata Kawah Putih, Kaupaten Bandung. The method used is descriptive-qualitative by using the Nominal Group Technique (NGT) as a guide to analyze. Data were obtained from observations and interviews with informants purposively. The conclusion that the community is involved in functional or collaboration level.

Keyword: *Community's involvement, Tourism Development, Tourism Business, Nominal Group Technique.*

PENDAHULUAN

Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten ingin menjadikan Kawasan Wisata Bandung Selatan sebagai aset wisata yang diminati oleh wisatawan. Hutan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten dikelola oleh suatu unit bisnis dengan nama Kesatuan Bisnis Mandiri Wisata (KBM), dalam kegiatannya, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten memiliki beberapa divisi *Cluster* usaha wisata, salah satunya adalah Wana Wisata Kawah putih. dan merupakan suatu unit yang beraktivitas di bidang kepariwisataan, budaya dan edukasi, yang merupakan bagian dari KBM WBU Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten yang berlokasi di kaki Gunung Patuha, tepatnya di kawasan daya tarik wisata Ciwidey .Kawasan ini sudah sangat dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Kawasan Wisata Bandung Selatan.

Kesempatan bisnis yang menguntungkan melalui keterlibatan masyarakat pihak ataupun organisasi yang dimaksud diatas adalah keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya secara bersama, membuka akses pasar, pengembangan teknologi, alih informasi, perlindungan lingkungan, pengembangan sumber daya manusia dan kondisi – kondisi yang dianggap sebagai prioritas didalam keterlibatan masyarakat di wana wisata kawah putihdan masalah yang diangkat sebagai topik penelitian ini adalah Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Pariwisata di Wana Wisata Kawah Putih.

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata di Wana Wisata Kawah Putih pada saat ini hanya berlangsung pada kegiatan "usaha-usaha pariwisata"diantaranya, warung makan,warung stroberry namun untuk kedalaman keterlibatan masyarakat tersebut haruslah ditelaah kembali sehingga sejauh manakah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tersebut dapat diketahui. Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan dapat kita lihat dari seberapa besar masyarakat lokal yang terlibat dalam setiap kegiatan pariwisata. Dengan adanya kegiatan pariwisata, diperlukanlah suatu analisis untuk mengungkapkan bentuk keterlibatan masyarakat yang ada di wana wisata kawah putih.

Prety, J. (1995) dalam Syahyuti (2006) menyatakan bahwa, dari berbagai bentuk dan jenis keterlibatan masyarakat dapat dibedakan berdasarkan kedalaman dan

keluasan keterlibatan masyarakat. Sedangkan Mikkelsen (1999:69), membedakan 4 pendekatan dalam proses pengembangan keterlibatan masyarakat, yaitu: Pendekatan Keterlibatan Pasif, yakni melalui pelatihan dan informasi. Pendekatan ini berdasarkan pada anggapan bahwa pihak eksternal yang lebih tahu, lebih menguasai pengetahuan, teknologi, skill dan sumber daya. Melalui pendekatan ini menghasilkan tipe komunikasi satu arah, yakni *topdown* atau dari atas ke bawah, yang mencerminkan bahwa hubungan antara pihak eksternal dan masyarakat lokal bersifat vertikal. Pendekatan Keterlibatan Aktif, komunikasi dua arah mulai terjadi pada jenis pendekatan ini, namun masih mengacu pada pendekatan pertama bahwa pihak eksternal lebih tahu dibandingkan masyarakat lokal. Dalam pendekatan ini, dialog antar masyarakat lokal dan pihak eksternal mulai terbuka. Usaha ini diupayakan agar masyarakat lokal dapat berkesempatan untuk berinteraksi dengan para petugas dari institusi eksternal. Contoh dari tipe pendekatan ini adalah pelatihan dan kunjungan. Pendekatan keterlibatan dengan Keterikatan, tipe pendekatan ini serupa dengan kontrak sosial antara pihak eksternal dengan masyarakat lokal. Terjadinya suatu kesepakatan yang telah disepakati tentang apa yang harus dilakukan masyarakat lokal dan apa yang harus dilakukan dan diberikan pihak eksternal. Masyarakat setempat diberi suatu tanggung jawab pada pengelolaan kegiatan yang telah disepakati dan mendapat dukungan dari pihak eksternal baik finansial maupun teknis. Nilai positif dari tipe pendekatan ini adalah masyarakat lokal dapat belajar mengenai pengelolaan pembangunan serta bentuk modifikasi apa yang dapat dibuat apabila terdapat kesepakatan tujuan yang diinginkan.

Keterlibatan atas Permintaan Setempat, pada tipe pendekatan ini pembangunan dilaksanakan atas dasar keputusan masyarakat setempat. Peranan pihak eksternal lebih kepada memenuhi apa yang diminta dan dinyatakan oleh masyarakat, bukan menentukan apa yang harus dipenuhi. Dalam tipe ini pihak luar lebih berperan kepada pendamping atau konsultan bagi masyarakat lokal dan tidak ada komando atau instruksi sama sekali kepada pihak masyarakat. Pernyataan tersebut memberikan informasi bahwa hubungan antar organisasi melalui keterlibatan dapat dikembangkan menuju arah hubungan keterlibatan yang semakin kuat, sehingga keterlibatan yang dilaksanakan akan bersinggungan dengan aspek – aspek yang mampu mendukung pengembangan kegiatan organisasi menjadi lebih baik. Pengembangan hubungan keterlibatan dapat dilaksanakan oleh organisasi ataupun pihak yang bergerak dalam berbagai bidang, termasuk pelaku pariwisata.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi aktual Wana Wisata Kawah Putih dalam pengembangan usaha Pariwisata ?
2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata di Wana Wisata Kawah Putih ?

Tujuan Dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai keterlibatan antara masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata di Wana Wisata Kawah Putih dan diharapkan akan bermanfaat bagi pihak pengelola Wana Wisata Kawah Putih agar mampu mengembangkan keterlibatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan wisata dan keterlibatan masyarakat bersama pihak – pihak yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata maupun *non*-pariwisata dalam masyarakat berskala regional, nasional, maupun internasional di masa depan.

Tinjauan Pustaka

Konsep Pengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan.

Pada dasarnya pengembangan kepariwisataan di suatu tempat dimaksudkan untuk dapat meningkatkan keuntungan ekonomi, akan tetapi dalam pengembangan ini harus diupayakan juga agar tidak menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan kerusakan lingkungan. Mempertahankan kualitas lingkungan pada kepariwisataan alam mutlak diperlukan sebab daya tarik utamanya justru pada lingkungan tersebut.

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan menurut WTO (1998:21) adalah, *“Sustainable tourism development meet the needs of present tourists and host regions while protecting and enhancing opportunities for the future. It is envisaged as leading to management of all resources in such a way that economic, social and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological processes, biological diversity, and life support systems”*.

Sedangkan McIntyre (1993) dan France (1997) dalam Marsongko (2001) mendefinisikan pariwisata yang berkelanjutan sebagai berikut, *“Suatu model pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal untuk jangka pendek dan jangka panjang; memberikan pelayanan dan kualitas pengalaman yang baik kepada pengunjung dan menjaga kualitas lingkungan untuk mencapai dua hal sebelumnya”*.

Keberhasilan pembangunan pariwisata bergantung pada bagaimana cara penanganan antara kepentingan pariwisata dan lingkungan secara benar. Sebagai pertimbangan utamanya adalah penilaian yang tepat terhadap hubungan pariwisata dengan lingkungan serta prinsip kebijakan yang digunakan dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan lingkungan pariwisata.

Empat komponen pokok yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Daerah tujuan wisata
2. Wisatawan
3. Usaha pariwisata
4. Pertimbangan ataupun pengaruh global

Menurut Mowforth & Munt (1998) agar dapat tercapainya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, maka konsep *suistainable development* harus mempertimbangkan 7 aspek kunci, yaitu:

1. *Futurity*
Pembangunan tidak diartikan dalam jangka waktu yang biasa dipergunakan oleh kalangan pengusaha dan politisi melainkan lebih dari itu.
2. *Inter generation Equity*
Kegiatan–kegiatan masa sekarang jangan mengurangi sumber daya yang harus tersedia untuk generasi yang akan datang.
3. *Keterlibatanstakeholders*
Semua kelompok (masyarakat, politisi, dll) yang berpengaruh dalam pembangunan harus terlibat dalam debat-debat dan pembuatan keputusan.
4. *The balancing of economic and environmental factors*
Keputusan harus dibuat dengan berdasarkan isu yang luas daripada hanya sekedar biaya ekonomi dan isu-isu lingkungan harus dianggap bukan sebagai penghambat pembangunan.
5. *Environmental capacity*

Semua dampak lingkungan harus dikaji dalam batasan pengaruhnya terhadap proses-proses keseimbangan agar keseimbangan lingkungan tidak terganggu.

6. *Emphasis on Quality as well as Quantity*

Keputusan tidak dibuat berdasarkan biaya terkecil melainkan berdasarkan solusi yang memberikan dampak merugikan yang terkecil.

7. *Compability with local system*

Pembangunan harus menjaga kelangsungan sistem-sistesosial, politik dan ekologis lokal.

Konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan inidapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan Wana Wisata Kawah Putih yang akan direncanakan. Sebagai pertimbangan utamanya adalah hubungan yang erat antara pariwisata dengan lingkungan sekitarnya baik alam, sosial-ekonomi dan sosial-budaya. Keberlanjutan pariwisata sangat bergantung pada kestabilan kualitas lingkungan yang baik karena kualitas lingkungan merupakan daya tarik utama bagi wisatawan.

Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang berada di suatu wilayah geografi yang sama dan memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada di sekitarnya. Di negara-negara maju dan berkembang pada umumnya pariwisata dikelola oleh kalangan swasta yang memiliki modal usaha yang besar yang berasal dari luar daerah dan bahkan luar negeri. Sehingga masyarakat lokal yang berada di suatu daerah destinasi pariwisata tidak dapat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata. Ketidakterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata sering kali menimbulkan opini bahwa masyarakat lokal bukan termasuk stakeholders dari pariwisata dan merupakan kelompok kesempatan bisnis dalam bidang pariwisata.

Keterlibatan Masyarakat

Kata keterlibatan yang dapat diartikan ikut serta. keterlibatan dapat membuat masyarakat, penduduk melakukan berbagai kegiatan, baik itu berskala lokal maupun nasional. Keterlibatan yang dilakukan masyarakat berbeda-beda tingkatannya, akibat dari perbedaan skala kegiatan. Keterlibatan itu antara lain, keterlibatan karena paksaan (*manipulative participation*), keterlibatan dengan kekuasaan dan ancaman (*coercive participation*), partisipasi karena adanya dorongan (*indiced participation*), keterlibatan yang bersifat pasif (*passive participation*) dan keterlibatan secara spontan (*spontaneous participation*).

Dari segi bentuk, keterlibatan memiliki dua bentuk, yaitu keterlibatan horizontal dan keterlibatan vertikal Terdapat kaitan yang erat antara partisipasi dan insentif, tanpa suatu insentif maka partisipasi tersebut berubah makna dari suatu keinginan manusia untuk ikut serta secara sukarela dalam suatu kegiatan yang dianggap dapat memperbaiki harkat hidup masyarakat menjadi suatu tindakan paksaan. Jadi pengertian keterlibatan masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat atau penduduk dalam berbagai kegiatan baik yang bersifat lokal maupun nasional, dapat terjadi secara sukarela paksaan, adanya dorongan maupun pasif dengan bentuk secara vertikal atau horizontal.

Partisipasi masyarakat yaitu melibatkan seluruh warga dalam pengelolaan, seperti adanya institusi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan (forum dengar pendapat, survey masyarakat) dan adanya lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki hak dan kemampuan untuk memberikan pendapat padapemerintah (asosiasi, perkumpulan, lingkungan, RT/RW). Masyarakat harus aktif dalam institusi dan lembaga

untuk mempengaruhi keputusan publik. Keuntungan dari keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, yakni membantu menciptakan peluang baru bagi pengembangan kehidupan bermasyarakat, pengembangan regional untuk menpelajari masa lampau, dan mampu dalam pengembangan kepariwisataan di wana wisata kawah putih dan mempromosikan keseimbangan lingkungan alam, tempat tinggal yang nyamandan *local genius*.

Keterlibatan yang dilakukan masyarakat berbeda-beda tingkatannya, akibat dari perbedaan skala kegiatan. Keterlibatan itu antara lain, Keterlibatan karena paksaan (*manipulative participation*), Keterlibatan Masyarakat dengan kekuasaan dan ancaman (*coercive participation*), Keterlibatan karena adanya dorongan (*induced participation*), keterlibatan yang bersifat pasif (*passive participation*) dan Keterlibatan secaraspontan (*spontaneous participation*).

Definisi Keterlibatan menurut kalangan di lingkungan aparat perencana danpelaksana pembangunan adalah kemauan masyarakat untuk mendukung program program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya secara mutlak. Pengertian ini mengasumsikan adanya subordinasi subsistem oleh suprasistem dansubsistem adalah suatu bagian yang pasif dari sistem pembangunan nasional. Dalam melakukan pengembangan pada suatu kawasan, perencana dan pelaksana menggunakan konsep hirarkis dalam menyeleksi proyek pembangunan tersebut. Proyek pengembangan yang berasal dari pemerintah dianggap sebagai proyek pengembangan untuk masyarakat dan menjadi prioritas utama sedangkan proyek pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat diistilahkan sebagai suatu keinginan dan menjadi prioritas rendah.

Pengertian lain dari keterlibatan adalah kerjasama antara masyarakat dan pengelola dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pengembangan. Karena keterlibatan masyarakat merupakan suatu kerjasama, maka dalam pengertian ini subsistem memiliki aspirasi nilai keterlibatan yang perlu direkomendasikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program pembangunan. Keterlibatan masyarakat juga dapat diartikan sebagai kerjasama yang bersifat langsung dengan sedemikian rupa sehingga setiap kelompok masyarakat ataupun masyarakat sendiri dapat terlibat secara langsung dan nyata dalam proses pengembangan.

Dalam Keterlibatan masyarakat terdapat beberapa hambatan yang harus disadari. Hambatan itu berasal dari masyarakat dan dari pengelola. Hambatan dari masyarakat adalah adanya budaya diam atau enggan berpendapat, lemahnya kemauan untuk terlibat karena ada banyak peraturan atau perundang-undangan yang meredam keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan kepariwisataan, contohnya UU No. 5 tahun 1979 mengenai kekuasaan Kepala Desa/Pemerintah yang sangat kuat, dan lebih patuh pada perintah atasan dari pada sebagai pengayom masyarakat. Terdapat kaitan yang erat antara Keterlibatan dan insentif, tanpa suatu insentif maka keterlibatan tersebut berubah makna dari suatu keinginan manusia untuk ikut serta secara sukarela dalam suatu kegiatan yang dianggap dapat memperbaiki harkat hidup masyarakat menjadi suatu tindakan paksaan, dan hal ini yang menyebabkan terjadinya mobilisasi. Usulan yang datang dari dinas (pemerintah) yang biasanya lolos dalam proses seleksi dan dianggap sebagai proyek pengembangan. Usul-usul dari masyarakat akan ditampung untuk memperkecil makna dari keterlibatan dan kebiasaan aparat pemerintah untuk curiga terhadap setiap usul dari masyarakat karena merasa ada pihak lain yang menggerakkan.

Keterlibatan memiliki dua bentuk, yaitu keterlibatan horizontal dan keterlibatan vertikal. Dimaksud dengan keterlibatan horizontal adalah masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, dimana setiap anggota masyarakat dapat keterlibatan secara sejajar satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama ataupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Sedangkan keterlibatan vertikal adalah masyarakat terlibat atau mengambil suatu bagian dalam suatu program dari pihak lain, dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, klien dan pengikut.

Terdapat beberapa tahapan dalam Keterlibatan yaitu: Keterlibatan dalam atau melalui kontak sebagai suatu awal perubahan dengan pihak lain; keterlibatan dalam memperhatikan dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima maupun menolak; keterlibatan dalam perencanaan pengembangan, termasuk pengambilan keputusan. Perasaan yang terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin dalam masyarakat; Keterlibatan dalam pelaksanaan operasional pengembangan; Keterlibatan dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pengembangan; dan Keterlibatan dalam menilai pengembangan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai pelaksanaan pengembangan sesuai dengan perencanaan dan sejauh mana dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa cara dalam menggerakkan Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan adalah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; dijadikan stimulus dalam masyarakat agar dapat mendorong timbulnya jawaban yang diinginkan; dijadikan motivasi terhadap masyarakat yang berfungsi membangkitkan tingkah laku yang diinginkan secara bersama.

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan dapat diartikan bahwa keterlibatan masyarakat adalah kerjasama antara masyarakat dengan pengelola dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan masyarakat memiliki dua bentuk, yaitu keterlibatan vertikal dan horizontal. Adanya budaya diam pada masyarakat dapat menimbulkan Keterlibatan pasif, sehingga perlu dilakukan cara-cara untuk menarik minat masyarakat, salah satunya dengan memberikan insentif dalam setiap kegiatan berlanjut.

Adanya interaksi yang terjadi baik antara manusia sebagai pengunjung, dengan manusia dan obyek budaya yang dikunjungi, maka pembahasan makalah ini tidak hanya terbatas pada wisata budaya tapi sudah mencakup pariwisata budaya. Sementara manusia yang berinteraksi di sini dapat mencakup kalangan yang sangat luas yaitu manusia sebagai pengunjung, manusia yang dikunjungi yang terkait erat bahkan merupakan bagian dari obyek budaya yang dikunjungi, baik *tangible* maupun *intangible*, termasuk juga manusia yang berperan sebagai pendukung prasarana dan sarana pariwisata tersebut.

Selain itu dalam konteks pariwisata budaya, perlu disadari bahwa makna istilah ini dapat dipandang baik sebagai proses maupun sebagai produk. Sebagai proses pariwisata budaya merupakan aktifitas pertukaran informasi dan simbol-simbol budaya antara wisatawan sebagai tamu dengan masyarakat yang didatangi sebagai tuan rumah. Dalam pengertian ini ialah pariwisata memberikan sumbangan bagi dialog antar budaya dan sekaligus sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan saling pengertian dan perdamaian. Pariwisata budaya sebagai proses, khususnya proses pertukaran ide, juga memberikan sumbangan bagi tumbuhnya ide-ide kreatif. Hal ini mudah dipahami karena kreatifitas biasanya tumbuh karena munculnya pikiran-pikiran alternatif yang umumnya datang dari luar.

Dalam arti kedua, pariwisata budaya dapat dipandang sebagai produk, yaitu atraksiatraksi wisata yang ditawarkan kepada wisatawan, khususnya jenis wisata yang

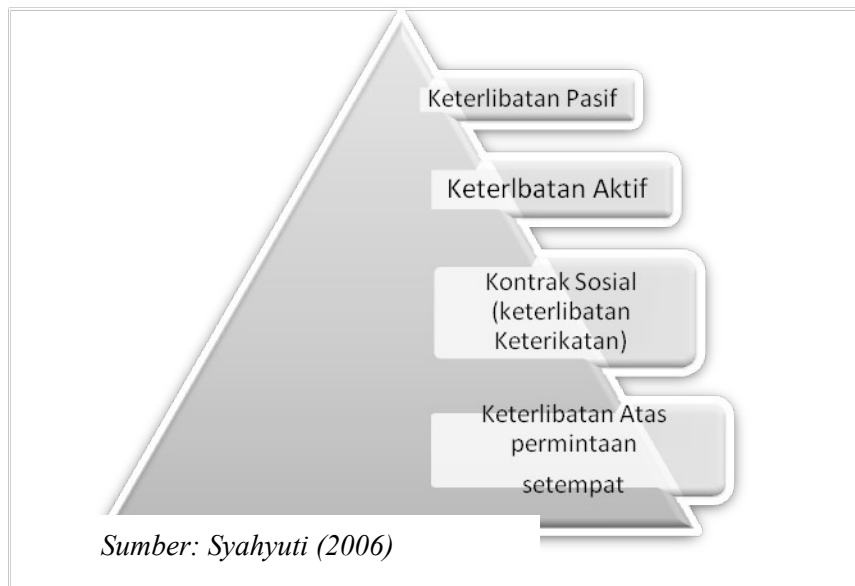
memuat informasi atau mengandung pesan-pesan yang bersifat budaya. Seperti sudah dikemukakan, atraksi-atraksi wisata ini dapat berupa peninggalan-peninggalansejarah, pertunjukan kesenian, ritual keagamaan, pertunjukan keterampilan dan lain lain, yang sedikit banyak telah dikemas untuk dapat dinikmati oleh wisatawan. Melalui kemasan tersebut diharapkan wisatawan dapat memperoleh pengalaman kebudayaan dengan cara melihat sesuatu yang dirasa unik, berbeda, mengesankan dan berbagai sensasi yang dibutuhkan untuk memperkaya kebutuhan spiritualnya. Daya tarik inilah yang menyebabkan wisatawan bersedia untuk mengeluarkan biaya sebagai kompensasinya. Dalam pengertian inilah pariwisata memperoleh arti yang paling umum dipahami oleh masyarakat, yaitu sebagai suatu aktifitas yang diarahkan untuk mendapatkan keuntungan atau meningkatkan pendapatan.

Berkaitan dengan kedalaman serta sejauh mana masyarakat itu terlibat, Pretty, J. (1995), menjelaskan bentuk keterlibatan sebagai berikut:

1. Keterlibatan pasif atau *manipulative* → *Co-option*;
Ini merupakan bentuk keterlibatan yang paling lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
2. Keterlibatan informative → *Co-option*;
Di sini masyarakat hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan. Hasil studi, tidak dibahas bersama masyarakat dan pihak luar tetap berjalan sendiri.
3. Keterlibatan konsultatif → *Consultation*;
Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindak lanjuti.
4. keterlibatan insentif → *Co-operation*;
Masyarakat memberikan korban dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.
5. *Keterlibatan fungsional* → *Collaboration*
Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandiriannya.
6. Keterlibatan interaktif → *Co-learning*;
Masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan, Pola ini cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.
7. Keterlibatan (*self mobilization*) → *Collective action*;
Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan

teknis serta sumberdaya yang diperlukan. Yang terpenting, masyarakat juga memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan.

Gambar. 1
Bentuk Keterlibatan Masyarakat



Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Menurut Pigram (1994) dalam Hall & Richards (2000:49), terdapat 4 (empat) kriteria tentang partisipasi masyarakat berdasarkan konsepsi pariwisata berkelanjutan, yaitu, pertama; masyarakat lokal ikut terlibat dalam proses pembangunan, sehingga terdapat keselarasan keputusan dan juga dapat meningkatkan motivasi masyarakat lokal di periode selanjutnya. Kedua; masyarakat lokal turut mendukung upaya konservasi dan perlindungan sumber daya (Tourism Concern, 1992). Ketiga; pariwisata sebagai industri pelayanan sangat berpengaruh kepada sikap kooperatif dari masyarakat lokal, terutama dalam membangun nama baik dari keberlangsungan pariwisata itu sendiri (Simmons, 1994). Keempat; partisipasi masyarakat lokal dalam mendukung dan mengembangkan pariwisatanya dapat meningkatkan rasa kepuasan wisatawan (Cole, 1996).

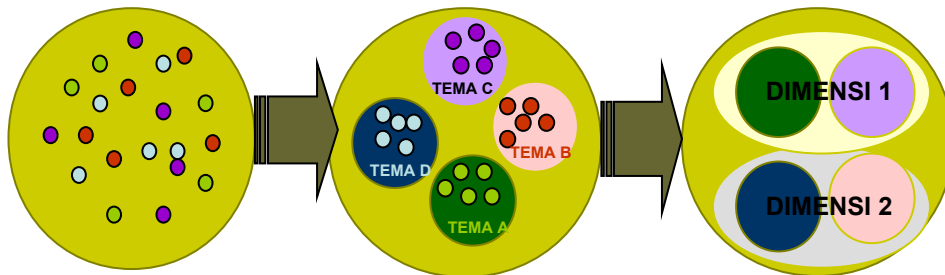
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif. Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini berusaha menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas sosial itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena yang terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Wana Wisata Kawah Putih.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis NGT atau *Nominal Group Technique* dengan tiga tahap analisis yaitu tahap pertama mengkategorikan pernyataan permasalahan yang muncul ke dalam tema-tema permasalahan secara terpisah, tahap kedua yaitu memberikan indeks berdasarkan tingkat kepentingan tema yang dirancang

untuk menggambarkan tingkat kepentingan yang berbeda, dan tahap terakhir adalah memberikan peringkat terhadap tema dan mengidentifikasi dimensi-dimensi permasalahan yang digunakan untuk memberikan peringkat terhadap tema-tema permasalahan yang terbentuk.

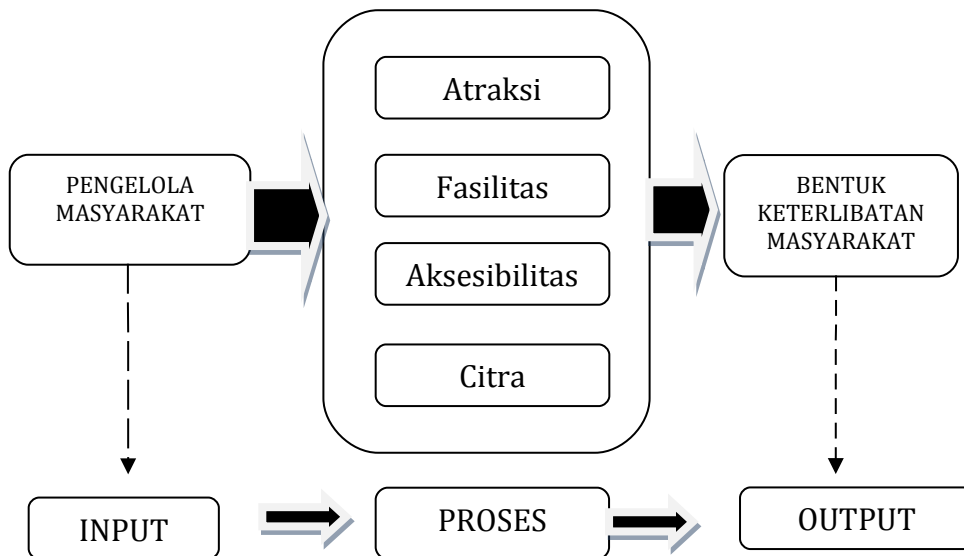
Gambar 2
Nominal Group Technique



Sumber: Esterberg & Michael (2002 : 73)

Adapun model penelitian ini dapat dilihat dalam nodel sebagai berikut:

Gambar 3
Model Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Wana Wisata Kawah Putih

Pengelola Wana Wisata Kawah Putih melakukan pengelolaandengan prinsip – prinsip konservasi bagi kegiatan wisata di Wana Wisata Kawah Putih. Kegiatan yang dilakuakn untuk mengkonversi alam dengan cara melindungi, merehabilitasi,

memanfaatkan, sumber daya alam secara berkelanjutan menciptakan keharmonisan dan senengi anatara pengelola dengan masyarakat yang terlibat dan memperkuat peran serta masyarakat dan pengelola serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di Wana Wisata Kawah putih agar tercapai keadilan keseimbangan dan berkelanjutan dan meningkatkan nilai sosial ekonomi dan keterlibatan masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga fungsi utama kegiatan berwisata di wana Wisata Kawah Putih terlindungi untuk kepentingan pengelolaan pengembangan yang berasal dari pengelola dianggap sebagai pengembangan untuk rakyat dan menjadi prioritas utama.

Wana Wisata Kawah Putih di kawasan Bandung Selatan menjadi salah satu tujuan wisata karena Wana Wisata Kawah Putih tersebut yang menjadi primadona di Kawasan Wisata Bandung Selatan yaitu Wana .Wisata Kawah Putih yang dikelola oleh unit bisnis Perhutani, karena keunikan yang dimiliki objek wisata tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari pandangan wisatawan mengenai Wana Wisata Kawah Putih *Contoh: "Wana Wisata Kawah Putih memiliki kawah belerang yang dapat dilihat secara langsung dan jaraknya lebih dekat dibanding dengan kawah yang dimiliki oleh Gunung Tangkuban Parahu"*. Hal itulah yang membuat wisatawan berkunjung ke Wana Wisata Kawah Putih tersebut, dan merupakan suatu nilai lebih bagi pengunjung.

Dalam menciptakan suatu objek wisata yang baik ada beberapa faktor *resources* yang perlu diperhatikan seperti, *kualitas, daya tarik, fasilitas* yang memadai dan penetapan tata ruang yang baik. Mayoritas wisatawan nusantara sangat menyetujui tetang tiga faktor *resources* tersebut, dengan begitu pengelola wana wisata kawah putih harus memperhatikannya sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisata. Selain itu adanya jaminan keselamatan dan keamanan dalam melakukan aktivitas wisata, pelayanan yang diberikan dan kebersihan objek itu sendiri harus diperhatikan, karena itu merupakan tiga faktor *competences* yang dapat menciptakan Wana Wisata Kawah Putih yang baik. Dengan memperhatikan tiga faktor tersebut akan mempengaruhi kepuasan wisatawan dan membuat wisatawan kembali untuk mengunjungi wana wisata tersebut.

Dilihat dari hasil wawancara dengan pengelola banyak wisatawan mancanegara yang datang ke wana wisata kawah putih, relatif banyak yang tidak mengetahui Wana Wisata Kawah Putih secara keseluruhan bahwa suatu unit usaha bisnis yang mengelola objek wisata yang berbasis alam di Kawasan Wisata Bandung Selatan dengan jalur masuk adalah Kawasan Wisata Ciwidey. Pengelola dapat memberikan petunjuk atau TIC sebagai pusat informasi mengenai unit bisnis tersebut, termasuk objek-objek yang dikelola, sehingga selain wisatawan mengetahui tentang objek tersebut juga mengetahui tentang usaha pariwisata dan Wana Wisata Kawah Putih banyak yang melakukan aktivitas wisata menikmati pemandangan, piknik.

Secara keseluruhan rata-rata wisatawan nusantara menyukai aktivitas wisata yang berbasis rekreatif dengan segala aspek legalitas yang menunjang. dengan mempertimbangkan pilihan wisatawan nusantara terhadap aktivitas yang bersifat rekreatif maka pengembangan sebaiknya diarahkan pada pengembangan yang menyediakan sarana untuk petualangan. Wisatawan juga lebih condong mengarah untuk mengunjungi beberapa objek sekaligus dalam satu rangkaian perjalanan dikarenakan jaraknya yang cukup dekat karena masih satu arah, hal ini juga menguntungkan untuk membuat suatu paket wisata. Dalam rangkaian wisata juga harus ditunjang dengan sarana akomodasi yang sesuai, dan kebanyakan wisatawan lebih untuk memilih penginapan yang sederhana namun bersih begitu pula dengan sarana penyedia makan dan minum, wisatawan lebih memilih untuk datang ke tempat yang memiliki kualitas namun dengan harga yang terjangkau, hal ini tidak terlepas dari

rendahnya tingkat pendapatan yang mempengaruhi *spending power* wisatawan. Karena kebanyakan wisatawan yang datang bersama keluarga, maka mereka lebih memilih untuk mengatur kegiatannya sendiri dari pada menggunakan paket wisata yang diatur oleh Biro Perjalanan Wisata, karena waktu selama menikmati daya tarik wisata tidak dibatasi.

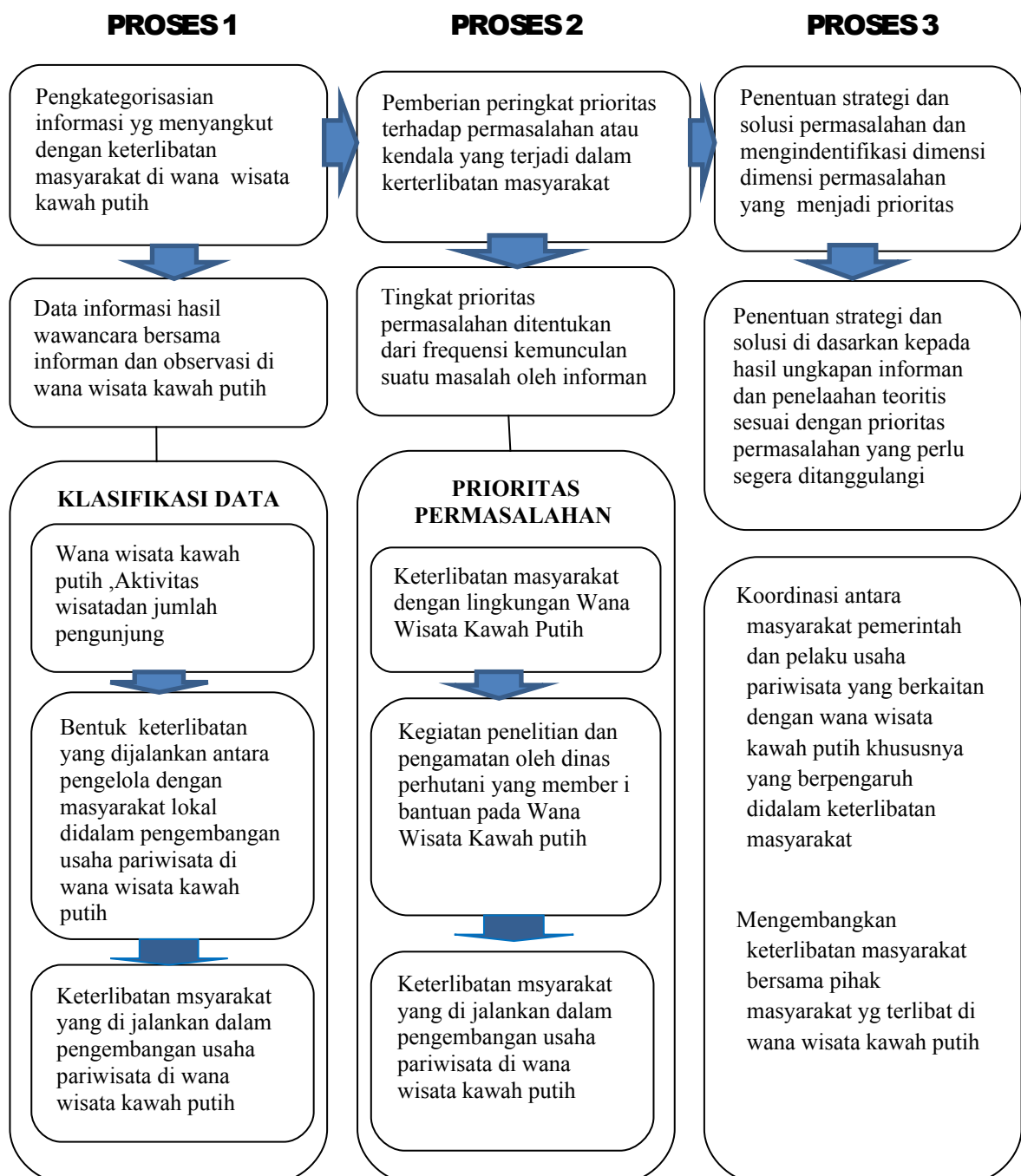
Melihat tren pasar yang berkembang saat ini, wisatawan lebih dominan memilih objek wisata alamiah, hal ini disebabkan sudah jenuhnya wisatawan dengan suasana kota, sehingga lebih memilih untuk kembali kepada alam. Merupakan salah satu faktor yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan objek wisata yang ada di Kawasan Wisata Bandung Selatan. Para wisatawan, melakukan kegiatan wisata secara individu tidak menggunakan pemandu wisata merupakan suatu pengalaman yang baru dalam melihat wisata Kawah Putih adalah suatu daya tarik wisata yang berbeda dari daya tarik yang lainnya. Maka wisatawan akan merasa lebih menikmati pemandangan yang menarik yang mana didalam sepanjang jalan menuju ke Wana Wisata Kawah Putih dikelilingi suasana alam dan dapat menggunakan kendaraan umum sampai ke wana wisata tersebut.

Keterlibatan Masyarakat Dalam pengembangan Usaha Pariwisata di Wana Wisata Kawah Putih

Permasalahan yang paling pokok yang diperoleh melalui hasil wawancara adalah kondisi pengembangan usaha pariwisata sangat basekembang, sehingga dapat berdampak terhadap pelaksanaan pengembangan usaha pariwisata bagi pengunjung di Wana Wisata Kawah Putih. Analisis NGT dapat digambarkan dalam bentuk skema, mulai dari tahapan pengumpulan data lapangan hingga kepada proses pengelompokan tema yang berkaitan dengan permasalahan menyangkut pengembangan pariwisata di Wana Wisata Kawah Putih sehingga dapat diketahui permasalahan yang menjadi prioritas utama yang mampu mempengaruhi pelaksanaan hubungan keterlibatan masyarakat di Wana Wisata Kawah Putih.

Berikut adalah rangkuman bentuk keterlibatan masyarakat di Wana Wisata Kawah Putih dengan menggunakan analisis NGT.

Gambar 4
Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengembangan Usaha Pariwisata
Di Wana Wisata Kawah Putih



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bentuk aktivitas di wana wisata kawah putih ialah berbasis kawah dan alam dengan atraksi kawah belerang yang dapat dilihat secara langsung dan jaraknya lebih dekat dibanding dengan kawah yang dimiliki oleh Gunung Tangkuban Parahu.

Bentuk keterlibatan masyarakat dalam usaha pariwisata di Wana Wisata Kawah Putih pada tingkat fungsional atau kolaborasi seperti berikut :

1. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata yang mana pengelola menyediakan fasilitas berupa warung-warung jualan makanan dan minuman dan strobery disekitar yang dikelolah oleh masyarakat sekitas Wana Wisata Kawah Putih.
2. Keterlibatan masyarakat dalam menyediakan pemandu lokal yang mengenal betul lokasi setempat terkait dengan paket wisata yang akan dikembangkan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam menyediakan tukang Foto keliling yang mana semua tukang foto terdaftar dan terkoordinir langsung Usaha kemitraan.
4. Keterlibatan masyarakat dalam penyediaan transportasi /ontang anting, ojek dari Pintu masuk sampai ke wana wisata kawah putih.
5. Keterlibatan Masyarakat dalam pengelolaan parkir dengan masyarakat yang terdapat di wana wisata kawah putih.
6. Keterlibatan masyarakat mengenai pengelolah teolet, masjid di kluster patuha untuk kepentingan wisatawan yang datang.
7. Keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan perkebunan masyarakat digunakan sebagai usaha perkebunan strobery untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
8. Keterlibatan masyarakat dengan pengelola ATV dan *Outbond* untuk daya tarik.

Saran

1. Pengelola Wana Wisata Kawah Putih disarankan untuk melibatkan masyarakat setempat bekerjasama dengan asosiasi ataupun organisasi dalam negeri dan luar negeri sehingga menuju tahapan keterlibatan yang lebih tinggi.
2. Membentuk hubungan kemitraan antara masyarakat dengan wana wisata kawah putih dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata. Hubungan keterlibatan masyarakat diarahkan kepada pengembangan usaha pariwisata di wana wisata kawah putih, sebagai salah satu perwujudan misi menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai pengembangan usaha pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Baud-Bovy, Fred Lawson. 1998. *Tourism & Recreation (Handbook of Planning and Design)*, Butterworth-Heinemann, London.
- Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Prenada Media Group, Jakarta.
- David Faulkner, Gerry Johnson. 1995. *Manajemen Strategik*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Dephillipi R, Reed. 1991. *Three Perspective on Appropriation Hazard in Cooperative Agreements*, SMS Conference Paper, Toronto.
- Doz, Yves L., Gary Hamel. 1998. *Alliances Advantage : The Art of Creating Value Through Partnering*, Harvard Business Scholl Press, Boston.
- Esterberg, Michael K. 2002. *Qualitative Method for Social Science*, Butterworth-Heinemann, Oxford, London.

- Faulkner, David & Johnson. 1992. *Manajemen Strategik*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Gunflit. 2006. *Journal of Northeast Minnesota Sustainable Development Partnership's*, KPMG, Canada.
- Inskeep, Edward. 1991. *Tourism Planning*, Ian Nostand Reinhold, New York.
- Johanson, Mattson. 1987. *Interorganisational Relations in Industrial Systems, International Journal Management and Organization*, vol 17, issue 1, Spring.
- Kusmayadi & Sugiarto. 2000. *Metodologi Penelitian Dalam Bidang Kepariwisata*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lynch, Robert Porter. 1993. *Business Alliances Guide: The Hidden Competitive Weapon. How to plan, negotiate, and manage strategic partnerships for increased corporate profits*, John Wiley & Sons Inc, New York.
- Middleton, Victor T.C. 1994. *Marketing In Travel & Tourism*, Heinemann Professional Publishing, London.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rianto Adi. 1994. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008, *Pemanfaatan Pengendalian Ruang Kawasan Bandung Selatan*.
- Porter, Michael E, 1998. *Competitive Advantage (Creating and Sustaining Superior Performance)*, New York, Simon & Schuster Inc.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Swarbrooke, John. 1995. *The Development & Management of Visitor Attractions*. Butterworth-Heineman, Oxford.
- Syahyuti. 2006. *30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian: Penjelasan Tentang Konsep, Istilah, Teori Dan Indikator Serta Variabel*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta.
- Undang - Undang R.I. No. 10 Tahun 2009, *Tentang Kepariwisata dan Usaha Kepariwisata*.